

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara maupun daerah yang sangat penting. Tanpa pajak, maka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari pajak. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana dari penerimaan pajak negara maupun pajak daerah.

Pemungutan pajak mempunyai peran yang strategis, bukan semata-mata karena merupakan sumber penerimaan negara, tetapi pajak juga kerap kali digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah (Mahdavi, 2008). Sebagai instrumen kebijakan, pemungutan pajak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah. Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya (Shome, 2003). Sejak dimulainya *Tax Reform* 1983, Indonesia sangat mengandalkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak (Fajar, 2006).

Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukkan *taxing power* daerah yang sesungguhnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

## *Pendahuluan*

otonomi daerah (Feltensein and Iwata, 2005). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002).

Suatu pemerintahan daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Luthfi, 2006). Provinsi Jawa Barat mempunyai keunikan terkait dengan penerimaan pajak daerah. Selama lima tahun terakhir, pajak-pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, mempunyai kontribusi yang sangat signifikan, dibandingkan dengan penerimaan jenis-jenis pajak lainnya. PKB dan BBNKB bahwa selalu menempati dua besar penerimaan pajak daerah.

Hasil pemungutan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan (Barratt and Smith, 2005). Sebenarnya, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut, relatif tidak menambah *social cost* yang baru, jika sebagian besar penggunaannya dikhususkan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, termasuk masalah transportasi, khususnya transportasi massa (Haan and Scholz, 2007). Sebagaimana dilakukan di Swedia dan Perancis, pajak polusi diperuntukkan khusus mengatasi masalah polusi, termasuk membiayai temuan baru tentang energi pengganti BBM.

*“An example of such a second-best policy for air pollution can be found in Sweden where the polluters pay a charge on nitrogen oxide (NOx) emissions and the revenues are returned to the same group of polluters in proportion to their production of useful energy (Sterner 2002). The French air pollution tax is another*

## *Pendahuluan*

*example of a revenue-refunded instrument, of which the revenues are allocated to abatement subsidies that benefit the group of targeted polluters (Millock)”*

Pemungutan pajak yang penerimaannya digunakan khusus untuk membiayai pengeluaran publik tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara konseptual dikenal dengan istilah *earmarked tax* atau *tax earmarking*. Para pendukung *earmarked tax* berargumentasi bahwa penerapan jenis pajak ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marsiliani and Renstrom, 2000).

Perubahan pemungutan PKB dan BBNKB yang mengadopsi konsepsi *earmarked tax* menjadi wacana yang masih langka untuk dieksplorasi karena kendala, politis maupun teknis. Politisi mempengaruhi pembelanjaan pemerintah dan tujuan mereka direfleksikan dalam aliran fiskal (Ghate and Zak, 2002). Seberapa besar *political will* pemerintah daerah dan DPRD (selaku lembaga legislatif yang berwenang mengesahkan anggaran) terlihat dari seberapa besar porsi yang dialokasikan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kota Cimahi perlu mengoptimalkan pemberian pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan dukungan oleh berbagai pihak tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat dihadapkan pada berbagai fenomena, yaitu: a. kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak; b. rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan; c. Kelemahan sumber daya manusia aparatur dalam memahami perpajakan.

## *Pendahuluan*

Berdasarkan uraian diatas tentang kewajiban pajak, pemungutan pajak, dan sumber pendapatan daerah, serta mengingat akan besarnya pengaruh pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis perpajakan mengenai pajak daerah yang berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah di kota Cimahi dengan judul penelitian ***“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Cimahi”***

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2004 s/d 2012 secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2004 s/d 2012 secara simultan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2004 s/d 2012 yang dilakukan secara parsial.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2004 s/d 2012 di Kota Cimahi yang dilakukan simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian merupakan sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang selama ini dipelajari di perkuliahan, sembari memperdalam pemahaman mengenai ilmu-ilmu tersebut. Penelitian ini juga merupakan tanda bakti penulis bagi masyarakat dan lingkungan tempat penulis berkembang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sebagai acuan untuk menentukan langkahnya lebih lanjut. Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang kurang baik, maupun mempertahankan kondisi yang sudah baik dan sesuai harapan.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca di kalangan akademis dan non-akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu, terutama di bidang Manajemen Keuangan, karena di dalam penelitian ini dapat dilihat keuangan daerah kota Cimahi, pendapatan setiap tahunnya, serta perhitungan yang mendasarinya.